



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUPRAPTO,
2. Jabatan : INVESTIGATOR KNKT
3. NHK : 754659

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.059.289.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 786.939.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 457.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.315.970.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 698.880.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 4552 m2/135 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 125.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 269.907.476

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.454.196.476



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.454.196.476

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.